

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (1) tentang “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Selain itu, juga tercantum dalam aturan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta UUD sementara pada pasal 1 ayat (1). Tantangan terbesar bagi Indonesia yakni cara untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan dari tatanan masyarakat yang demokratis.

Demokrasi membahas tentang hak fundamental dan permasalahan klasik sesuai dengan fakta yang aktual. Permasalahan klasik menjadi fokus utama kajian wacana filsafat dari zaman Yunani kuno disebut *Polish Arena*. Kemudian dikatakan fundamental karena berkaitan dengan dasar nilai kehidupan yang mengatur tentang sistem kehidupan dan diterapkan oleh masyarakat. Masyarakat dalam pelaksanaannya dapat dijadikan subjek dan objek sekaligus, dikatakan aktual karena demokrasi menjadi salah satu keinginan yang sangat diharapkan setiap bangsa dan negara, serta mampu menerapkannya di era reformasi (Suyahmo, 2012:1)

Demokrasi mengarah kepada sosial, kultur budaya, dan politik. Selain itu, demokrasi juga membahas tentang spirit, mental, dan memahami nilai demokrasi itu. Misalnya kebebasan, toleransi, dan kesamaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah disepakati.

Sistem demokrasi mulai merebak dalam lapisan kehidupan bermasyarakat sejak adanya reformasi. Masyarakat sangat antusias terhadap kemajuan zaman. Selama bertahun-tahun Indonesia takut terhadap kebebasan yang sekarang kembali berkibar terutama pada kehidupan sosial. Walaupun, suasana dan wujud demokrasi belum sepenuhnya imbang dari aspek kearifan, kematangan, dan kedewasaan yang menyebabkan kebebasan seakan-akan sama dengan hukum rimba. Mereka yang kurang memahami sering dianggap sebagai “Kerikil” demokrasi yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fachrurozi (2015:57–59) penerapan prinsip demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut. Selain itu, terdapat hambatan dalam penerapan nilai demokrasi di negara Indonesia. Contohnya adanya aksi kekerasan yang terjadi pada kegiatan Pilkada di suatu daerah yang ada di Aceh (Harian Republika, 16 April 2022). Pihak yang kalah saat pemilihan tidak menerima kekalahan secara lapang dada, sehingga terkesan memaksa dan melakukan tindakan seperti kekacauan yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi.

Kondisi semacam itu tidak semestinya ada di negeri Indonesia, karena hal tersebut dapat menyebabkan bibit demokrasi layu sebelum berkembang. Agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlunya strategi yang tepat untuk menemukan dan menerapkan nilai demokrasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga terbiasa untuk bersikap sesuai dengan nilai demokrasi. Dalam kehidupan bermasyarakat demokrasi sangatlah penting karena, dengan menguasai nilai demokrasi seseorang akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan pendapat yang telah disatukan. Nilai demokrasi harus ditanamkan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga sikap masyarakat sesuai dengan nilai demokrasi. Masyarakat perlu mengambil tindakan yang tepat, salah satunya adalah memiliki

media yang tepat dan terarah, seperti sebuah forum atau lembaga yang bisa mengayomi, mengedukasi, serta mengarahkan. Dalam hal ini, forum yang menjadi wadah dan media edukasi untuk dapat mengimplementasikan nilai demokrasi ialah sekolah.

Generasi yang demokratis dapat terwujud melalui pendidikan demokrasi yang saat ini sudah diterapkan dalam dunia pendidikan (Agustin & Dewi, 2021:224) kehidupan persekolahan merupakan langkah penting dalam menerapkan nilai demokrasi kepada peserta didik. Pada masa sekarang, menciptakan nilai demokrasi merupakan salah satu cara strategis bagi sekolah sehingga pendemokrasian bangsa Indonesia dapat terwujud sejak dini. Adapun tujuan pendidikan untuk memberikan pemahaman terhadap hal atau sesuatu yang berguna bagi kehidupan, baik dalam aktivitas Jasmani, rohani, dan nurani. Nilai demokrasi perlu diterapkan di sekolah sehingga siswa dapat mengikuti perubahan global seperti masuknya budaya baru dari berbagai bangsa di dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu terutama ahli dalam bidang berdemokrasi dan berkarakter yang tangguh di tengah konflik peradaban.

Hal di atas sesuai dengan isi pasal 4 ayat (1) yang berisi tentang “Pendidikan harus dapat diselenggarakan dengan asas adil dan demokrasi”. Tempat pembentukan nilai demokrasi secara sadar oleh masyarakat disebut sekolah. Apabila pribadi telah menerapkan nilai demokratis dalam dirinya maka fungsi Pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003 telah tercapai. Fungsi tujuan pendidikan nasional meliputi membentuk sikap, generasi beradab, mampu mengembangkan diri, dan membentuk generasi yang cerdas.

Pada kenyataannya, untuk menerapkan nilai demokrasi tidaklah mudah pada lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah terutama guru harus mendukung terciptanya lingkungan demokrasi, penerapan nilai demokrasi di sekolah merupakan salah satu langkah awal pemerintah agar terbentuknya nilai demokrasi pada generasi muda. Hal tersebut dapat terjadi karena, melalui proses pendidikan siswa dapat memperoleh ilmu baik itu secara teoritik maupun praktis tentang nilai demokrasi. Remaja pada jenjang sekolah menengah atas memasuki fase pertumbuhan dari remaja menuju dewasa, fase tersebut ditunjukkan dari remaja mulai memahami segala sesuatu yang baik dan buruk bagi kehidupannya. Adapun tujuan penanaman nilai demokrasi pada siswa agar nantinya menjadi warga yang paham dan taat terhadap peraturan di suatu negara sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban, serta mendidik generasi muda agar mereka mandiri baik secara psikologis maupun sosial.

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, menunjukkan kurang menghayati dan memahami kandungan nilai demokrasi. Oleh karena itu, sekolah dapat merancang program yang nantinya akan memberikan kesadaran berdemokrasi berorientasi kepada setiap kelas untuk menciptakan kebiasaan baik sesuai dengan norma yang berlaku. dalam pembelajaran PPKn mengandung materi tentang nilai demokrasi yang akan diajarkan secara langsung oleh pendidik sesuai dengan kurikulum.

Pembelajaran PPKn merupakan salah satu mata pembelajaran yang berfokus untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Selain itu, masyarakat hendaknya memiliki jiwa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan

UUD 1945 dan Pancasila. Salah satu tujuan mata pelajaran PPKn yakni memberikan pendidikan dan nilai Pancasila sehingga peserta didik memiliki keyakinan didalam diri. Sejalan dengan Hidayati & Rukmini (2021:41) berpendapat bahwa tujuan mata pelajaran PPKn meliputi pembentukan, mental, sikap, dan nilai demokrasi untuk mewujudkan masyarakat demokratis sehingga menjalin integritas dan persatuan sesuai dasar negara.

Berdasarkan hasil wawancara tahap awal bersama guru PPKn kelas X IPS yaitu dengan ibu LH, beliau mengatakan pemahaman siswa akan nilai-nilai demokrasi masih tergolong rendah, data tersebut dibuktikan saat peneliti melakukan observasi awal di SMA Negeri 1 Kerinci dimana dalam proses pembelajaran siswa masih tidak percaya diri dalam mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok, dan lebih disayangkan lagi ada siswa yang belum paham akan materi yang dijelaskan tetapi tidak berani bertanya, pada saat diberi tugas siswa banyak yang tidak bisa menjawabnya.

Guru PPKn dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pendidik, untuk untuk menjadi guru yang profesional Pendidikan harus memiliki strategi untuk merancang dan mengembangkan materinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti pada materi menanamkan nilai demokrasi, pendidik harus melaksanakan proses pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik mampu memahami materi dan memiliki output untuk kehidupan sehari-hari.

Kemudian pada tanggal 09 s.d 10 Maret 2023 peneliti melakukan observasi awal pada kelas X IPS SMA Negeri 1 Kerinci, adapun hasil yang peneliti peroleh diantaranya:

1. Siswa tidak memiliki keberanian untuk bertanya jika tidak paham atas materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru, hal ini menunjukkan kurangnya nilai percaya diri.
2. Banyak siswa yang tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Hal ini mencerminkan kurangnya rasa percaya diri siswa.
3. Rasa menghargai antar sesama yang masih kurang
4. Kurangnya kerjasama siswa dalam pembelajaran dan
5. Siswa juga suka mengejek siswa lain ketika gagal menyelesaikan tugas di dalam kelas.

Peneliti melakukan wawancara bersama siswa kelas X IPS pada tanggal 8 Maret 2023 yang bertempat di kantin SMA Negeri 1 Kerinci, dimana siswa tersebut mengatakan bahwa tidak memiliki rasa kepercayaan diri pada saat ingin bertanya mengenai materi yang tidak dipahami dikarenakan takut salah dan ditertawakan temannya. Kemudian siswa lainnya juga mengatakan sering diasingkan oleh temannya dikarenakan keterbatasan fisik.

Beragam-ragam tingkah laku siswa, yang membuktikan rendahnya nilai demokrasi di jenjang pendidikan. Pola pikir demokrasi harus dibentuk dan dimiliki oleh siswa sejak awal, dengan menyadari pentingnya penerapan nilai demokrasi. Oleh karena itu, lingkungan sekolah dapat mensetting suasana yang demokrasi seperti dalam proses pembelajaran, guru membuat suasana belajar dengan melibatkan peristiwa yang sedang update dengan adanya kegiatan tersebut siswa lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, sekolah merupakan wadah yang dapat memberikan pengalaman yang berharga untuk masa depan siswa.

Berdasarkan hasil observasi dan data yang peneliti temukan dilapangan mengenai kurangnya nilai demokrasi terhadap siswa maka Pembelajaran yang dirasa mampu untuk membangun jiwa akan kesadaran nilai-nilai demokrasi yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tujuan pembelajaran PPKn itu sendiri yaitu untuk membentuk kepribadian siswa sesuai dengan Kebudayaan NKRI, dan membentuk generasi yang cinta tanah air. Selain itu Sucahyono (2016:19) juga menjelaskan tujuan pembelajaran PPKn itu sendiri yakni untuk: 1) membentuk kepribadian peserta didik berdasarkan kebudayaan, 2) mewujudkan generasi yang cinta tanah air, dan 3) mewujudkan nilai demokrasi untuk membentuk perilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran PPKn tersebut selaras dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Kerinci yaitu berakhlak mulia, berkarakter dan berprestasi serta peduli lingkungan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa visi sekolah dan tujuan PPKn di SMA Negeri 1 Kerinci telah sejalan dengan tujuan pendidikan demokrasi yaitu membentuk generasi muda yang berkarakter dan membentuk kepribadian yang baik.

Seperti diketahui bahwa sekolah menengah atas (SMA) termasuk ke dalam jenjang pendidikan yang ada di Indonesia memiliki makna strategi untuk perkembangan peserta didik dalam setiap masanya. Dari sisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai langkah strategis dalam upaya menerapkan nilai sosial dan spiritual dalam diri peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang peka permasalahan kemanusiaan yang kontemporer dan demokrasi di negara Indonesia.

Perlunya penerapan nilai-nilai demokrasi disekolah untuk melatih siswa hidup berdemokrasi, sehingga mampu menciptakan warga negara yang baik di kemudian hari.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X IPS SMA Negeri 1 Kerinci”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di kelas X IPS SMA Negeri 1 Kerinci?

### **1.3 Fokus Masalah**

Berdasarkan topik dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti membatasi penelitian agar tujuan penelitian dapat diteliti secara obyektif dan tidak terlalu luas. Adapun fokus penelitian yakni penerapan nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X IPS SMA Negeri 1 Kerinci. Nilai demokrasi pada pembelajaran meliputi nilai kerja sama antar siswa, percaya diri, kebebasan berpendapat, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X IPS SMA Negeri 1 Kerinci.



## **1.5 Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian, dapat menambah wawasan tentang teori nilai demokrasi di sekolah terutama jenjang pendidikan menengah atas.
- b. Hasil penelitian, dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber pemikiran bagi siswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan nilai demokrasi.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk merancang bahan ajar mata pembelajaran PPKn, terutama pada materi yang berkaitan dengan nilai demokrasi.

### 2. Secara Praktik

- a. Bagi siswa: mampu memberikan gambaran informasi dan pemahaman kepada siswa terhadap implementasi nilai demokrasi di lingkungan sekolah.
- b. Bagi sekolah: bisa memberikan gambaran wawasan yang berisi informasi tentang pemahaman, analisis, dan penerapan nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Kerinci

## **1.6 Definisi Istilah**

### a. Nilai demokrasi

Nilai demokrasi merupakan gagasan yang memuat pandangan hidup untuk memahami hak dan kewajiban, menyadari keanekaragaman, dan memberikan perlakuan yang sama kepada siswa.

b. Pembelajaran PPKn

Pembelajaran PPKn ialah salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk membina etika dan moral. Pembelajaran PPKn juga dilakukan secara berkesinambungan dan utuh. selain itu pembelajaran PPKn dapat membentuk karakter atau watak masyarakat yang baik sehingga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

